

Persepsi Mahasiswa terhadap Campus Democratic Values dan Relevansinya dengan Pendidikan Kewarganegaraan

Isna Sari Rukmana¹, Asti Sugiarti², Sabaruddin³

^{1,2,3}Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, Indonesia

¹ isna.rukmana@polipangkep.ac.id

Abstract

- Purpose** : The researcher conducted a study aimed at describing student perspectives and identifying the factors influencing the effectiveness of PKn in shaping democratic citizens.
- Method** : This study employed a mixed-methods approach with a sample of 151 students.
- Results** : The findings indicate that the overall PKn learning experience had a highly positive impact (96.27%). Regarding student perceptions of campus democratic values and their relevance to Civic Education, the majority of students responded positively (over 95%) across fundamental aspects, including the broadening of national perspectives (98.67%), the communication of democratic values (98.68%), and the instilling of ethical responsibility (97.36%). These results demonstrate that PKn effectively serves as a medium for transmitting information (civic knowledge) that is well-received by students at a cognitive level.
- Conclusion** : The findings indicate that the overall PKn learning experience had a highly positive impact (96.27%).

Keywords : Student perceptions, campus democratic values, Civic Education

1. Pendahuluan

Demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan sebuah mekanisme yang menempatkan rakyat sebagai poros utama pemegang kedaulatan (Arrahma, 2025). Di Indonesia, demokrasi bukan sekadar prosedur pemilihan umum, melainkan sebuah manifestasi dari nilai-nilai Pancasila yang menuntut keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif (Muptiah, 2025). Namun, sejarah dan realitas politik menunjukkan bahwa sistem demokrasi yang kokoh tidak dapat tumbuh hanya melalui penguatan institusi negara atau regulasi formal semata (Permatasari, 2025; Irwin, 2025). Keberlangsungan demokrasi yang sehat sangat bergantung pada kualitas warga negaranya (*civic virtue*) (ARTINA, 2026; Sujana, 2019). Tanpa adanya masyarakat yang memiliki literasi politik, kesadaran hukum, dan etika berdemokrasi, sistem ini rentan terjebak ke dalam praktik populisme sempit, manipulasi opini publik, hingga konflik horizontal yang mengancam integrasi nasional.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) hadir sebagai instrumen strategis dan wahana pedagogis untuk menjawab tantangan tersebut (Mahmudah, 2023; Afriani, 2025). Di lingkungan perguruan tinggi, PKn memegang tanggung jawab besar untuk mentransformasi mahasiswa dari sekadar

penduduk menjadi warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab (*smart and good citizenship*) (Takarina, 2026; Pangalila, 2025). Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum pendidikan wajib memuat pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam konteks pendidikan demokrasi, PKn berperan sebagai "laboratorium" yang membekali mahasiswa dengan tiga pilar utama kewarganegaraan, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), karakter atau watak kewarganegaraan (*civic disposition*), serta keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*).

Namun, efektivitas PKn sebagai wahana pendidikan demokrasi saat ini dihadapkan pada dinamika zaman yang sangat kompleks (Yunita, 2025). Di era disrupsi informasi dan digitalisasi, mahasiswa sebagai generasi asli digital (*digital native*) terpapar pada arus informasi yang tidak terbatas. Fenomena polarisasi politik di ruang siber, maraknya ujaran kebencian, serta masifnya penyebaran hoaks menjadi ancaman serius bagi kohesi sosial demokrasi kita. Mahasiswa, yang diharapkan menjadi agen perubahan (*agent of change*) dan penjaga nilai-nilai demokrasi, seringkali terjebak dalam apatisisme politik atau justru terjebak dalam aktivisme digital yang destruktif tanpa pemahaman konseptual yang kuat (Rukmana, Peran Kampus Dalam Mempersiapkan Generasi Z Sebagai Pemimpin Masa Depan. , 2025). Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pembelajaran PKn di kelas mampu beradaptasi dengan tantangan kontemporer tersebut dan memberikan dampak nyata pada perilaku politik mahasiswa.

Selain tantangan eksternal, problematika internal dalam proses pembelajaran PKn juga menjadi isu yang krusial (Mulyani, 2024; Suriadi, 2025). Selama ini, terdapat persepsi yang berkembang di kalangan mahasiswa bahwa PKn adalah mata kuliah yang bersifat teoritis, normatif, dan menjemukan (Mantri, 2024; Dahliyana, 2022). Pendekatan pembelajaran yang cenderung satu arah (*teacher-centered*) dan berbasis hafalan seringkali membuat substansi nilai demokrasi tidak tersampaikan secara efektif (Saputra, 2025). Mahasiswa memandang PKn hanya sebagai formalitas kurikuler untuk mendapatkan nilai akademik, maka internalisasi nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, berpikir kritis, menghargai perbedaan pendapat, dan semangat gotong royong tidak akan membekas dalam kesadaran mereka (Alim, 2025; Purnama, 2025). Padahal, persepsi mahasiswa terhadap mata kuliah ini merupakan kunci utama dalam menentukan keberhasilan transformasi nilai-nilai demokrasi ke dalam tindakan nyata.

Pentingnya meneliti persepsi mahasiswa terletak pada pemahaman bahwa persepsi adalah pintu gerbang bagi seseorang dalam menerima, mengolah, dan memberikan makna terhadap suatu stimulus dalam hal ini adalah pendidikan demokrasi (Sutrisman, 2019). Melalui studi mengenai persepsi, kita dapat mengidentifikasi kesenjangan antara apa yang dicita-citakan dalam kurikulum PKn dengan apa yang sebenarnya dirasakan dan dipahami oleh mahasiswa. Apakah mahasiswa melihat PKn sebagai sarana yang membebaskan dan mendewasakan cara mereka berdemokrasi, ataukah sebaliknya, hanya dianggap sebagai indoktrinasi masa lalu yang tidak relevan dengan kebutuhan masa depan (Widiatmaka, 2016; Mahendra, 2024). Jawaban atas pertanyaan ini akan memberikan dasar evaluatif yang kuat bagi pengembangan model pembelajaran PKn yang lebih partisipatif, dialogis, dan berbasis pada masalah nyata di masyarakat.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penelitian mengenai persepsi mahasiswa terkait Persepsi Mahasiswa terhadap Campus Democratic Values dan Relevansinya dengan Pendidikan

Kewarganegaraan di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep menjadi sangat mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan mahasiswa terkait Campus Democratic Values dan Relevansinya dengan Pendidikan Kewarganegaraan, dan juga untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas PKn dalam membentuk warga negara yang demokratis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pendidik, pengembang kurikulum, dan pengambil kebijakan pendidikan untuk merevitalisasi peran PKn agar benar-benar mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga dewasa dalam berdemokrasi, kritis terhadap ketidakadilan, serta aktif berkontribusi dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*Mixed Methods*) dengan desain Sekuensial Eksplanatori. Explanatori ini dimulai dengan mengumpulkan data kuantitatif kemudian baru mengumpulkan data kualitatif (Wijaya, 2025; Nasution, 2024). Implementasinya dilakukan melalui dua fase berurutan. Diawali dengan pengumpulan serta analisis data kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif yang dirancang berdasarkan temuan kuantitatif awal. Integrasi (*mixing*) kedua metode terjadi saat hasil analisis kuantitatif fase pertama digunakan untuk memandu proses pengambilan data kualitatif, sehingga kedua jenis data tersebut tetap berdiri sendiri namun saling berkaitan erat (Noviansah, 2025).

Populasi dalam kegiatan penelitian ini meliputi seluruh mahasiswa aktif Politeknik Pertanian Negeri Pangkep yang telah atau sedang menempuh mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian untuk Sampel, penelitian ini menggunakan teknik *Proportionate Stratified Random Sampling* dengan mengambil data secara acak dari berbagai jurusan/program studi untuk mewakili populasi secara keseluruhan berjumlah 151 mahasiswa (Wardana, 2026). Selanjutnya, untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan kuesioner dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur indikator *Campus Democratic Values* yang di isi secara digital melalui Google Form yang disediakan. Kemudian untuk memperkuat data kuantitatif, dilakukan pula wawancara untuk menggali aspek relevansi kurikulum PKn, disertai dengan studi dokumentasi pengisian kuesioner pada mata kuliah PKn di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.

3. Hasil

Penelitian ini mengeksplorasi persepsi mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Pangkep terhadap *Campus Democratic Values* atau nilai-nilai demokratis kampus serta relevansinya dalam perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Berdasarkan data dikumpulkan dari 151 responden mahasiswa melalui angket Google Form yang memuat 10 butir pernyataan dan diukur menggunakan skala Likert untuk mengetahui signifikansi antara variable yang diuji.

1. Persepsi Mahasiswa terhadap Peran PKn

Secara umum, tanggapan responden terhadap kontribusi PKn dalam membentuk nilai-nilai demokratis di lingkungan kampus tergolong sangat tinggi. Berikut adalah visualisasi tabulasi data hasil kuesioner:

Tabel 1. Hasil kuesioner

No	Butir Indikator	Kategori			
		Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
1	PKn membuka wawasan untuk menjadi warga negara yang baik	76	73	1	0
2	PKn menjadi sarana penyampaian nilai-nilai demokrasi.	56	93	1	0
3	PKn meningkatkan kesadaran hak, kewajiban, tanggung jawab, dan etika.	73	76	2	0
4	PKn menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan.	60	84	5	1
5	PKn melahirkan generasi yang berkarakter demokratis.	39	106	6	0
6	PKn mengembangkan pemahaman sistem pemerintahan dan partisipasi aktif.	31	111	7	0
7	Hubungan signifikan antara PKn aktif dengan peningkatan partisipasi politik Gen Z.	27	106	15	1
8	PKn memberikan penguatan representasi dan ekspresi setara di ruang publik.	26	114	8	1
9	Melalui PKn, mahasiswa dapat berinisiatif menjadi agen perubahan positif.	40	106	4	0
10	Mahasiswa menunjukkan perilaku bertanggung jawab atas konsekuensi tindakannya.	47	100	3	1

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dideskripsikan data berikut:

- Indikator 1 (Q1): PKn Membuka Wawasan Menjadi Warga Negara yang Baik
Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas mutlak responden memberikan respons positif, dengan 50,33% (76 responden) menyatakan Sangat Setuju dan 48,34% (73 responden) menyatakan Setuju. Hanya terdapat 0,66% (1 responden) yang menyatakan Kurang Setuju, sementara 0,66% sisanya merupakan data kosong (*missing value*). Hal ini menunjukkan bahwa secara kognitif, PKn dinilai sangat berhasil membangun fondasi awal wawasan kebangsaan mahasiswa.
- Indikator 2 (Q2): PKn Sebagai Sarana Penyampaian Nilai-Nilai Demokrasi
Distribusi jawaban pada indikator kedua didominasi oleh pilihan Setuju sebesar 61,59% (93 responden) dan Sangat Setuju sebesar 37,09% (56 responden). Sebanyak 0,66% responden memilih Kurang Setuju dan 0,66% data bersifat kosong. Data ini mengonfirmasi posisi mata

kuliah PKn sebagai saluran formal yang efektif dalam mentransmisikan konsep-konsep nilai demokrasi di lingkungan kampus.

3. Indikator 3 (Q3): PKn Meningkatkan Kesadaran Hak dan Kewajiban yang Bertanggung Jawab dan Beretika. Sebanyak 50,33% responden (76 orang) menyatakan Setuju dan 48,34% (73 orang) menyatakan Sangat Setuju bahwa PKn mendongkrak kesadaran etis terhadap hak dan kewajiban mereka. Porsi responden yang menyatakan Kurang Setuju sangat kecil, yaitu hanya 1,32% (2 responden) tanpa adanya data kosong.
4. Indikator 4 (Q4): Penanaman Nilai Kejujuran, Tanggung Jawab, dan Keadilan Melalui PKn Respon mahasiswa terhadap fungsi afektif PKn berada pada kategori sangat positif, dipimpin oleh jawaban Setuju sebesar 55,63% (84 responden) dan Sangat Setuju sebesar 39,74% (60 responden). Sebanyak 3,31% (5 responden) menyatakan Kurang Setuju, 0,66% (1 responden) Tidak Setuju, dan terdapat 0,66% data kosong.
5. Indikator 5 (Q5): PKn Dapat Melahirkan Generasi yang Berkarakter Demokratis Persepsi responden terhadap output pembentukan karakter menunjukkan angka 70,20% (106 responden) menyatakan Setuju dan 25,83% (39 responden) menyatakan Sangat Setuju. Sisanya, yaitu sebanyak 3,97% (6 responden) berada pada kategori Kurang Setuju.
6. Indikator 6 (Q6): PKn Mengembangkan Pemahaman Sistem Pemerintahan dan Mendorong Partisipasi Aktif. Hasil deskriptif menunjukkan konsentrasi pilihan terbesar pada jawaban Setuju yaitu 73,51% (111 responden), disusul oleh Sangat Setuju sebesar 20,53% (31 responden). Sementara itu, terdapat 4,64% (7 responden) Kurang Setuju dan 1,32% (2 responden) data kosong.
7. Indikator 7 (Q7): Hubungan Signifikan Pembelajaran Aktif PKn dengan Peningkatan Partisipasi Politik Generasi Z. Indikator ini mencatatkan dinamika sebaran data yang paling bervariasi. Meskipun kategori Setuju tetap mendominasi dengan 70,20% (106 responden) dan Sangat Setuju sebesar 17,88% (27 responden), indikator ini menghasilkan angka ketidaksetujuan tertinggi, yakni sebesar 9,93% (15 responden) menyatakan Kurang Setuju dan 0,66% (1 responden) Tidak Setuju, dengan 1,32% data kosong. Angka ini mencerminkan adanya persepsi kritis mahasiswa mengenai efektivitas korelasi teori kelas dengan implementasi politik riil.
8. Indikator 8 (Q8): PKn Memberikan Penguatan Representasi dan Ekspresi yang Setara di Ruang Publik. Responden mayoritas memberikan penilaian positif dengan 75,50% (114 responden) memilih Setuju dan 17,22% (26 responden) memilih Sangat Setuju. Sebanyak 5,30% (8 responden) menyatakan Kurang Setuju, 0,66% (1 responden) Tidak Setuju, dan 1,32% data kosong.
9. Indikator 9 (Q9): PKn Mendorong Inisiatif Menjadi Panutan Perubahan Positif Kelompok Sebanyak 70,20% (106 responden) menyatakan Setuju dan 26,49% (40 responden) menyatakan Sangat Setuju bahwa PKn memicu fungsi kepemimpinan sosial mereka. Kategori Kurang Setuju hanya sebesar 2,65% (4 responden) dengan 0,66% data kosong.
10. Indikator 10 (Q10): Menunjukkan Perilaku Bertanggung Jawab dan Menerima Konsekuensi Tindakan. Pada indikator perilaku mandiri ini, sebanyak 66,23% (100 responden) memilih Setuju dan 31,13% (47 responden) menyatakan Sangat Setuju. Terdapat 1,99% (3 responden) Kurang Setuju dan 0,66% (1 responden) Sangat Tidak Setuju.

Selanjutnya, untuk melihat kecenderungan umum data riset secara objektif, perlu dilakukan akumulasi total jawaban dari seluruh butir pertanyaan instrument, yaitu 10 indikator X 151 responden. Berdasarkan data tersebut, persentase dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2. Persentase akumulatif

Kategori Sikap Responden	Jumlah Frekuensi Jawaban	Presentase (%)	Kecenderungan data
Sangat setuju (SS)	505	33,67%	96,27%
Setuju (S)	939	62,60%	
Kurang setuju (KS)	46	3,07%	3,73%
Tidak Setuju (TS)	10	0,66%	
Total	1500	100%	Sangat Berpengaruh Positif

2. Praktik Budaya Demokratis Mahasiswa

Berdasarkan instrumen pertanyaan terbuka, mahasiswa menuliskan narasi tindakan nyata yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. Jawaban responden mengristalisasi pada empat kluster tindakan utama berikut:

- Musyawarah dan Penghargaan Opini: Mendengarkan pendapat teman sekelas saat kerja kelompok, berdiskusi di dalam organisasi himpunan mahasiswa (Ormawa), dan menerima hasil keputusan rapat.
- Penerimaan Keberagaman (Toleransi): Menghargai perbedaan SARA (suku, ras, agama, bahasa), tidak membedakan latar belakang sosial pertemanan, dan menghormati kebebasan beribadah.
- Partisipasi Elektoral: Terlibat dalam pemilihan presiden, bupati, pemilihan ketua OSIS/BEM, hingga proses *voting* dalam menentukan ketua tingkat (keti) atau seragam batik kelas.
- Tanggung Jawab Regulatif: Mengikuti perkuliahan tepat waktu, mengumpulkan tugas dosen secara jujur, dan menaati tata tertib kampus.

4. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa persepsi mahasiswa terkait *Campus Democratic Values* dan Relevansinya dengan Pendidikan Kewarganegaraan di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan memiliki hasil yang signifikan dan sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa: Realitas dihadapkan pada Jika dianalisis secara makro, akumulasi data kuantitatif yang menunjukkan angka 96,27% pengaruh positif (gabungan "Sangat Setuju" dan "Setuju") memberikan kesimpulan superfisial bahwa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah mencapai keberhasilan mutlak. Mahasiswa secara kognitif sepakat bahwa PKn membuka wawasan warga negara (98,67%) dan mentransmisikan nilai demokrasi (91,59%). Namun pada dasarnya, pendekatan ilmiah yang ini mengharuskan peneliti untuk melihat melalui angka secara dangkal. Tingginya angka persetujuan ini pada dasarnya mencerminkan keberhasilan PKn

pada tataran *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan). Mahasiswa memahami dengan baik "apa" itu demokrasi, "apa" saja hak dan kewajiban mereka, serta "bagaimana" idealnya seorang warga negara bertindak. Paradoks muncul ketika pengetahuan yang sempurna ini dihadapkan pada indikator-indikator yang menuntut konversi menjadi aksi nyata (*civic skills* dan *civic disposition*), di mana resistensi dan dinamika internal mahasiswa mulai terlihat.

1. Faktor *Gap* Relevansi Generasional dan Skeptisism Politik Formal

Dinamika paling krusial dalam penelitian ini ditemukan pada Indikator 7, yang mencatatkan angka keraguan ("Kurang Setuju") tertinggi sebesar 9,93% terkait hubungan pembelajaran aktif PKn dengan peningkatan partisipasi politik riil Generasi Z. Angka ini merupakan pintu masuk untuk membongkar faktor kedalaman yang memengaruhi efektivitas PKn. Ada sebuah celah (*gap*) relevansi yang disebabkan oleh perbedaan karakteristik generasional. Kurikulum PKn konvensional sering kali masih terjebak pada pembahasan struktur politik formal, hukum tata negara, dan lembaga-lembaga negara makro. Bagi Generasi Z (dalam hal ini mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Pangkep), model politik formal seperti itu cenderung dinilai kaku dan berjarak dari realitas kehidupan mereka. Akibatnya, sebagian kecil mahasiswa merasa ragu apakah aktivitas belajar di dalam kelas benar-benar mampu mendongkrak minat mereka untuk terlibat dalam politik praktis nasional yang dinilai penuh dengan polarisasi. Skeptisism ini menunjukkan bahwa efektivitas PKn terhambat apabila materi tidak didekatkan dengan gaya aktivisme kontemporer anak muda yang lebih bersifat praktis dan isu-spesifik.

2. Faktor Ekosistem Mikro Kampus sebagai Laboratorium Demokrasi Riil

Meskipun terdapat celah pada partisipasi politik makro, data kualitatif (jawaban terbuka) menyelamatkan implementasi nilai demokrasi ini melalui aktivitas skala mikro. Efektivitas pembelajaran PKn terbukti sangat dipengaruhi oleh faktor ekosistem terdekat mahasiswa, yaitu lingkungan kelas dan organisasi kemahasiswaan. Berdasarkan pengakuan responden, manifestasi perilaku demokratis mereka mewujudkan nyata dalam tindakan seperti: pembuatan *polling* kelas untuk penentuan jadwal kuliah pengganti, pemilihan ketua tingkat/himpunan, dan keharusan mendengarkan pendapat teman saat diskusi kelompok. Fenomena ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai PKn mengalami proses *lokalisasi*. Mahasiswa menerapkan prinsip *musyawarah untuk mufakat* bukan dalam skala negara, melainkan dalam skala komunitas terdekat mereka. Lingkungan mikro kampus berfungsi sebagai laboratorium sosial yang valid. Ketika institusi memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengelola urusan kelompoknya secara mandiri dan adil, di situlah efektivitas PKn bertransformasi dari sekadar hafalan teoritis menjadi karakter (*civic disposition*) yang menetap.

3. Faktor Literasi Etis dan Ruang Publik Digital

Faktor kedalaman lain yang memengaruhi bagaimana mahasiswa mengejawantahkan materi PKn adalah pergeseran ruang publik dari fisik ke digital. Karakter demokratis mahasiswa era modern sangat ditentukan oleh kapasitas mereka dalam mengelola informasi di media sosial. Temuan kualitatif mengonfirmasi bahwa responden menganggap perilaku seperti "bersikap bijak di media sosial", "tidak menyebarkan hoaks", dan "menyuarakan kebenaran/kritik terhadap kebijakan melalui ruang siber" sebagai bentuk tindakan demokratis sehari-hari. Hal ini menandakan bahwa tolok ukur efektivitas PKn tidak lagi bisa diukur hanya dari kehadiran fisik dalam rapat warga atau unjuk rasa di jalanan. Media sosial telah menjadi ruang publik setara di

mana mahasiswa Generasi Z mengaktualisasikan representasi dan ekspresi mereka (sebagaimana didukung oleh 75,50% responden pada Q8). Oleh karena itu, efektivitas PKN di masa depan akan sangat bergantung pada sejauh mana kurikulum mampu mengintegrasikan materi literasi siber dan etika digital ke dalam pembelajaran.

Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai penyebab, oleh karenanya, oleh Mulyani tahun 2024 bahwa Implementasi pendidikan kewarganegaraan global harus untuk menekankan demokrasi haruslah berbasis pendekatan dan proses pembelajaran yang relevan dengan konteks digital dan kearifan lokal, dan mempersiapkan tenaga pendidik dengan wawasan global meliputi hal-hal berikut:

1. Dekonstruksi Nalar Demokratis Mahasiswa: Kuat di Teori, Ragu di Ekspresi

Analisis data kuantitatif menunjukkan pola yang sangat menarik. Pada indikator normatif-teoretis (pernyataan 1, 2, dan 3), akumulasi respons positif mahasiswa (Sangat Setuju dan Setuju) mencapai hampir 99%. Mahasiswa secara mutlak memandang PKN berhasil menjadi jangkar moral untuk memahami hak, kewajiban, serta esensi etika kewarganegaraan. Namun, dinamika perubahan data terjadi pada indikator yang menyentuh dimensi agensi aktif di ruang publik (pernyataan 7 dan 8). Pada butir hubungan PKN dengan partisipasi politik Gen Z dan penguatan ekspresi setara di ruang publik, persentase pilihan "Sangat Setuju" merosot tajam (hanya berada di kisaran 17%). Sebaliknya, indikator "Kurang Setuju" merangkak naik. Kondisi ini mengindikasikan adanya gejala awal "robotisasi nalar" pada mahasiswa vokasi. Mahasiswa memiliki pemahaman kognitif yang sempurna tentang demokrasi di atas kertas, namun mengalami kecemasan atau kebingungan taktis ketika harus mentransformasikannya menjadi tindakan kritis di ruang publik kampus. Mereka mengalami hambatan untuk mengekspresikan pendapat secara setara karena kuatnya struktur hierarki birokratis kampus atau adanya dorongan sosiologis untuk sekadar "mencari posisi aman" di lingkungan akademik.

2. Membaca Ulang Pola Kualitatif Melalui Nilai Kemanusiaan Lokal. Jika pola robotisasi nalar di atas dibiarkan, mahasiswa hanya akan tumbuh menjadi pekerja pertanian yang patuh secara mekanis namun tumpul secara kritis. Oleh karena itu, data kualitatif mengenai perilaku harian mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Pangkep harus dihidupkan kembali melalui kearifan lokal Sulawesi Selatan meliputi:

- a. **Manifestasi *Tudang Sipulung* dalam Diskusi Akademik**

Mayoritas mahasiswa dalam jawaban kualitatifnya menekankan sikap "menghargai pendapat teman saat diskusi kelompok, meminta masukan jadwal kuliah pengganti, dan bermusyawarah dalam himpunan". Praktik ini sejatinya adalah internalisasi kultural dari konsep *Tudang Sipulung* (duduk bersama). Kultur komunal ini membuktikan bahwa mahasiswa Polipangkep secara organik memiliki modal sosial untuk merajut *deliberative democracy*. Pembelajaran PKN di politeknik harus memanfaatkan struktur ini. Kelas PKN tidak boleh terjebak pada metode ceramah konvensional (metode bank yang mekanistik), melainkan harus dikemas dalam bentuk forum *Tudang Sipulung* ilmiah, tempat mahasiswa berdiskusi setara dengan dosen mengenai regulasi agraria, hak petani, atau kebijakan kampus.

b. Relevansi *Siri'* na *Pacce* dalam Karakter Mahasiswa Vokasi Pertanian

Jawaban kualitatif lain menonjolkan komitmen mahasiswa untuk "tidak membedakan suku/agama, membantu teman yang kesulitan, serta siap menerima konsekuensi atas kesalahan". Perilaku ini merefleksikan perpaduan nilai *Siri'* (martabat/harga diri untuk berperilaku etis) dan *Pacce* (empati/kepedulian sosial yang mendalam). Di politeknik pertanian, nilai *Pacce* ini memiliki relevansi yang sangat vital. Mahasiswa dididik bukan sekadar mengoperasikan traktor atau mengelola laboratorium tanah demi industri (nalar mesin). Melalui PKn, nilai *Pacce* diarahkan menjadi kesadaran kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*). Mahasiswa didorong untuk menaruh empati pada nasib komunitas petani lokal di Kabupaten Pangkep, menjaga kedaulatan pangan Nusantara, dan melindungi kelestarian alam dari eksploitasi kapitalistik yang tidak berperikemanusiaan.

3. Mengembalikan Esensi *Ngewongke Uwong* dalam Kultur Kampus

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa sebanyak 147 mahasiswa bersepakat bahwa mereka harus menunjukkan perilaku bertanggung jawab. Sifat bertanggung jawab dan toleran yang dilaporkan oleh mahasiswa pada pertanyaan terbuka merupakan wujud nyata dari konsep *Ngewongke Uwong* (memanusiakan manusia). Selain itu, kepatuhan mahasiswa menaati aturan kampus jika diletakkan dalam koridor *Ngewongke Uwong*, bukanlah kepatuhan mekanik karena takut pada sanksi akademis (nalar robot), melainkan sebuah kesadaran etis bahwa mematuhi ketertiban umum adalah bentuk penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia sesama warga kampus. Relevansi PKn di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep berhasil diwujudkan bukan saat mahasiswa menghafal seluruh pasal dalam hukum tata negara, melainkan ketika mereka mampu berdiri tegak dengan etika *Siri'*, berdialog secara egaliter lewat nalar *Tudang Sipulung*, dan mengabdikan pada sektor pertanian dengan hati yang dipenuhi nilai *Pacce*.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berpengaruh sangat positif 96,27%. Persepsi mahasiswa terkait Persepsi Mahasiswa terhadap Campus Democratic Values dan Relevansinya dengan Pendidikan Kewarganegaraan mayoritas mahasiswa memberikan respons positif di atas 95% pada aspek-aspek mendasar, seperti pembukaan wawasan kebangsaan (98,67%), penyampaian nilai demokrasi (98,68%), hingga penanaman tanggung jawab etis (97,36%). Hal ini menunjukkan bahwa PKn secara signifikan dapat menjadi media transmisi informasi (*civic knowledge*) yang diterima dengan baik secara kognitif oleh mahasiswa.

Kemudian untuk faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas PKn meliputi: *Pertama* Faktor *Gap* Relevansi Generasional (Aktivitas Gen Z). Hal ini dapat dilihat dari munculnya angka "Kurang Setuju" tertinggi pada indikator partisipasi politik riil (9,93%) mengindikasikan adanya faktor resistensi atau ketidakcocokan metode. Artinya, secara realitas pembelajaran PKn masih berfokus pada struktur pemerintahan formal kurang menyentuh realitas aktifitas nyata Bersama mahasiswa yang cenderung lebih cair, berbasis digital, dan isu-spesifik. *Kedua*, adalah faktor Lingkungan Mikro Kampus (Budaya Kolektif): Pengalaman nyata mahasiswa dalam berdemokrasi sangat dipengaruhi

oleh ekosistem terdekatnya. Keputusan kolektif di tingkat kelas (seperti pembuatan *polling* tugas atau baju batik), dinamika organisasi/himpunan mahasiswa, serta interaksi dalam diskusi kelompok menjadi faktor determinan utama yang menjembatani teori kelas menuju pembentukan karakter demokratis yang riil. *Ketiga*, Faktor Etika Ruang Digital (Keterampilan Literasi): Kesadaran mahasiswa untuk bersikap bijak di media sosial dan menyuarakan pendapat secara santun menunjukkan bahwa efektivitas PKn saat ini bertumpu pada kemampuan mengelola informasi di ruang siber. Ruang publik digital kini menjadi medan utama implementasi *civic skills* bagi mahasiswa.

6. References

- Afriani, F. &. (2025). Strategi pengembangan pendidikan nilai melalui pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar*, 1(02).
- Alim, S. (2025). *Globalisasi dan pendidikan kewarganegaraan: Menyiapkan generasi cerdas dan toleran*. Malang: UIN Maliki Press.
- Arrahma, F. (2025). IMPLEMENTASI KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DALAM SISTEM KETETANEGARAAN INDONESIA: STUDI TENTANG SUPREMASI HUKUM DAN KEDAULATAN RAKYAT. . *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).
- ARTINA, F. &. (2026). SIAPAKAH WARGA NEGARA IDEAL DI ERA DEMOKRASI? SEBUAH TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS TENTANG GOOD CITIZENSHIP TAHUN 2019–2025. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 13(1), 205-214.
- Dahliyana, A. B. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Pendidikan Umum Dan Pendidikan Karakter Di Perguruan Tinggi*. Indonesia Emas Group.
- Irwin, D. E. (2025). Dinamika hukum konstitusi dan tantangan praktik demokrasi di Indonesia: Studi kritis terhadap oligarki politik dan reformasi sistem pemilu. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(04), 1327-1338.
- Mahendra, Y. R. (2024). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pengajaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 14-18.
- Mahmudah, H. S. (2023). *Pengantar kewarganegaraan: Membentuk warga negara yang berkualitas*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mantri, Y. M. (2024). Persepsi mahasiswa pada inovasi pembelajaran digital pendidikan kewarganegaraan di pendidikan tinggi vokasi. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1, pp. 103-110.
- Mulyani, H. K. (2024). Transformasi pendidikan kewarganegaraan global di era abad 21: Analisis implementasi dan tantangan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 21(1), 88.
- Muptiah, O. O. (2025). Sistem Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 3(1), 9-19.
- Nasution, F. H. (2024). Kombinasi (mixed-methods) dalam praktis penelitian ilmiah. . *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 251-256.
- Noviansah, A. (2025). MIXED METHOD (Analisis Langkah-Langkah Dalam Menggunakan Mixed Method). *Sangeang Journal*, 1(1), 1-12.
- Pangalila, T. F. (2025). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. . Purbalingga : CV Eureka Media Aksara.

- Permatasari, T. H. (2025). *Sejarah Perkembangan Demokrasi Dan Pelembagaan Demokrasi*. malang, Jawa Timur: Kramantara JS.
- Purnama, T. E. (2025). Membentuk generasi toleran: Studi empiris proses dan faktor pendorong internalisasi nilai multikultural mahasiswa pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. . *Journal of Moral and Civic Education*, , 9(2), 165-178.
- Rukmana, I. S. (2025). Peran Kampus Dalam Mempersiapkan Generasi Z Sebagai Pemimpin Masa Depan. . *PROSIDING MIMBAR JUSTITIA*, 2(1), 65-75.
- Saputra, R. A. (2025). Perbandingan Pendekatan Pedagogis dalam Pendidikan Islam: Dari Hafalan Tekstual Menuju Pembelajaran Berbasis Teknologi. *Educational Research Indonesia*, 2(2).
- Sujana, I. P. (2019). Civic virtue dalam rangka mewujudkan pemilu harmoni dan berkeadilan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 63-72.
- Suriadi, H. &. (2025). Problematika karakter generasi muda di era digital: Analisis kritis terhadap tantangan moral dan sosial di era teknologi informasi. *Journal of Social, Educational and Religious Studies*, 1(2), 20-37.
- Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan politik, persepsi, kepemimpinan, dan mahasiswa*. Guepedia.
- Takarina, S. B. (2026). Takarina, S. B., Subagio, H., & Hastangka, H. (2026). Pedagogi Kewarganegaraan dan Pembentukan Civic Virtues Mahasiswa: Praktik Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. . *Jurnal Citizenship Virtues*, , 6(1), 1-9.
- Wardana, Y. M. (2026). Analisis Telaah Tentang Populasi dan Sampel Pada Penelitian Pendidikan. *Teaching and Learning Research Journal*, 2(1), 167-172.
- Widiatmaka, P. (2016). Kendala Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun karakter peserta didik di dalam proses pembelajaran. . *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, , 13(2), 188-198.
- Wijaya, M. P. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Yunita, S. A. (2025). Membangun warga negara ideal: Peran pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif Indonesia. . *Indonesian Journal of Learning Studies*, , 5(2), 85-93.

---Halaman ini sengaja dikosongkan---